PENGARUH VARIABEL FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Alwi Alkadrie
NIM. B1011181053

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Alwi Alkadrie
NIM	:	B1011181053
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal	:	Pengaruh Variabel Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul tersebut diatas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang belaku (lembar hasil pemeriksaan palgiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 4 Maret 2025



Alwi Alkadrie
NIM. B1011181053

PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Alwi Alkadrie
NIM	:	B1011181053
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	:	Pengaruh Variabel Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, 14 Maret 2025

Alwi Alkadrie

NIM. B1011181053

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Variabel Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Alwi Alkadrie
B1011181053

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	8 Januari 2025

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Abd. Mubaraq, S.E.Sy., M.A. NIP 199111292022031009	24 Feb 2025	
2.	Ketua Penguji	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP 196312091989031004	21 Feb 2025	
3.	Anggota Penguji	M. Iman Taufik, S.E., M.E. NIP 198611232022031002	20 Feb 2025	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 05 MAR 2025
Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP.197706152003121004

KATA PENGANTAR

Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura. Dalam penulisan tugas akhir ini peneliti banyak mendapatkan bantuan materi maupun non materi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Barkah, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Nurul Bariyah, S.E., M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Metasari Kartika, S.E,. M.E selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Yanto, S.E., M.Sc selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Abd. Mubaraq, S.E.Sy., M.A. selaku Pembimbing yang sekaligus selalu memberikan inspirasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. selaku penguji 1 yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan tugas akhir ini.
7. Iman Taufik, S.E., M.E. selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan tugas akhir ini.
8. Seluruh staf dan karyawan administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu kelancaran proses administrasi skripsi ini..
9. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang banyak memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak yang banyak memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Ekonomi Angkatan 2018, khususnya kelas A terima kasih atas semua suka cita dan bantuan serta kebersamaan yang kalian berikan selama masa kuliah.
12. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Syarif Hamid dan Ibu Orintin yang luar biasa telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada saya selama menempuh masa studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
13. Saudara-saudara kandung saya Ali Zainal Abidin dan Alya syafira, terima kasih segala doa dan dukungannya yang sangat berharga serta telah memberikan semangat yang luar biasa untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat sekaligus mentor dalam pengerjaan porposal dan tugas akhir saya yaitu Yang Yang Setiawan, S.E dan Aditya Kurniawan, S.E.

15. Pacar saya tercinta Nuraisah, terima kasih telah setia mendukung dan mendoakan saya dalam hal apapun sehingga bisa menjalani dan menyelesaikan pendidikan masa studi dalam meraih gelar sarjana ini.
16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu baik dari dukungan maupun doanya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, yang dikarenakan terbatasnya pengalaman, pengetahuan, serta kemampuan yang dimiliki baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya, dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima saran dan kritik yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan berguna bagi pembaca pada umumnya.

Pontianak, 14 Maret 2025

Alwi Alkadrie
B1011181053

RINGKASAN

PENGARUH VARIABEL FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Latar Belakang

Banyaknya kabupaten/kota terutama di wilayah pedalaman masih memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik. Hal ini membatasi pergerakan barang dan jasa serta meningkatkan biaya produksi. Infrastruktur yang ada seringkali tidak memadai dalam hal kualitas dan kapasitas, membuat tidak mendukung kegiatan perekonomian. Hal ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam menghasilkan lebih banyak kekayaan dan kesempatan bagi penduduknya. Menurut Bawinti, *et al* (2018); pertumbuhan ekonomi yang stabil dari berkelanjutan dianggap sebagai faktor penting dalam mencapai kemakmuran jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi suatu daerah karna membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Merujuk pada Priyono & Ismail, (2016: 41); teori yang dikemukakan oleh Keynes untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Keynes menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam aktivitas perekonomian. Salah satu campur tangan pemerintah terhadap perekonomian adalah dengan melalui kebijakan fiskal. Adanya campur tangan pemerintah terhadap kebijakan fiskal bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keynes menjelaskan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan kebijakan yang dapat meningkatkan permintaan agregat dan penawaran agregat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Permasalahan

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat

4. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dimana difokuskan pada data yang berupa angka (*numerical*) yang diolah menggunakan metode statistika. Penelitian ini juga termasuk penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dengan tujuan untuk menguji atau menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang telah dihipotesiskan oleh peneliti (Sugiyono, 2016: 37). Dalam penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh variabel fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

5. Hasil Penelitian

Hasil pengujian koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,067317 dengan probability sebesar 0,0396 sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian Sufardi, (2019); Mononimbar, et al (2017); serta Panigoro, et al (2023) yang menyatakan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian koefisien regresi memiliki nilai sebesar 0,545803 dengan probability sebesar 0,0000 sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saraswati, (2018); Hakim & Wijayanti, (2016); serta Harahap, (2018) yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1 Simpulan

1. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Dengan lebih banyak penerimaan pajak, pemerintah daerah dapat mendanai berbagai proyek pembangunan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah yang stabil dan terukur dapat membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas perekonomian. Dengan terjaminnya pendapatan, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan secara efisien dan efektif. Penerapan pajak daerah yang efektif dan adil dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini, lingkungan sosial yang mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi.
2. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah Kalimantan Barat melakukan belanja modal, uang tersebut berputar melalui perekonomian. Kontraktor yang menerima proyek pembangunan akan membayar upah kepada pekerja, pekerja akan membelanjakan uangnya untuk membeli barang dan jasa, dan seterusnya. Menurut Wardhiah, (2018); proses ini menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang dapat meningkatkan output dan pendapatan nasional secara signifikan. Belanja modal untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan dan pelabuhan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang. Hal ini akan mengurangi biaya produksi dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Kalimantan Barat.

6.2 Rekomendasi

1. Bagi pemerintah Kalimantan Barat sebaiknya mengidentifikasi industri dominan seperti perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, kemudian rancang kebijakan perpajakan untuk mendukung pertumbuhan industri tersebut serta memanfaatkan berbagai rencana pusat untuk memperoleh dukungan finansial bagi pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri unggulan.
2. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi swasta, kesempatan kerja, dan retribusi daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **i**
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ..... **ii**
LEMBAR YURIDIS ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
RINGKASAN ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
ABSTRAK 1
1. PENDAHULUAN 2
2. KAJIAN LITERATUR 12
2.1. Tinjauan Teori 12
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes 12
2.1.2 Teori Penerimaan Pemerintah (Pajak Daerah) 15
2.2. Kajian Empiris **17**
2.3. Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian 18
2.3.1. Kerangka Konseptual 18
2.3.2. Hipotesis Penelitian 18
2.3.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 18
2.3.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 19
3. METODE PENELITIAN 21
3.1 Bentuk Penelitian 21
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 21
3.3 Data 22
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 22
3.4.1 Pertumbuhan Ekonomi 22
3.4.2 Pajak Daerah 22
3.4.3 Belanja Modal 22
3.5 Metode Analisis 22
3.5.1 Uji Model 22
3.5.1.1 Uji Chow 22
3.5.1.2 Uji Hausman 22
3.5.1.3 Lagrange Multiplier 23
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 23
3.5.2.1 Uji Multikolinearitas 23
3.5.2.2 Uji Heterokedastisitas 24
3.5.2.3 Uji Autokorelasi 24
3.5.3 Analisis Regresi Panel 24
3.5.4 Uji Hipotesis 25
3.5.4.1 Koefisien Korelasi dan Determinasi 25
3.5.4.2 Uji F (Uji Simultan) 26
3.5.4.3 Uji T (Uji Parsial) 26
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **27**
4.1 Hasil Penelitian 27
4.1.1 Model 27
4.1.1.1 Uji Chow 27
4.1.1.2 Uji Hausman 28
4.1.1.3 Lagrange Multiplier 28
4.1.2 Uji Asumsi Klasik 29
4.1.2.1 Uji Multikolinearitas 29
4.1.2.2 Uji Heterokedastisitas 30
4.1.2.3 Uji Autokorelasi 30
4.1.3 Analisis Regresi Panel 31
4.1.4 Uji Hipotesis 32
4.1.4.1 Koefisien Korelasi dan Determinasi 32
4.1.4.2 Uji F (Uji Simultan) 33
4.1.4.2 Uji T (Uji Parsial) 33
4.2 Pembahasan 34
4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 35
4.2.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 36

5. PENUTUP 38
5.1. Kesimpulan 38
5.3. Rekomendasi 38
DAFTAR PUSTAKA **40**
LAMPIRAN **42**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2022 3
Tabel 1.2 Perhitungan Pajak daerah Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2022 5
Tabel 1.3 Perhitungan Belanja Modal Kalimantan Barat ahun 2013 - 2022 8
Tabel 4.1 Uji Chow 27
Tabel 4.2 Uji Hausman 28
Tabel 4.3 Uji Lagrange Multiplier 29
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas 29
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas 30
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi 31
Tabel 4.7 Analisis Regresi Panel 31
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi 33
Tabel 4.9 Uji F (Uji Kelayakan Model) 33
Tabel 4.10 Uji t (Uji Parsial) 34
Tabel 4.11 Rekapitulasi Pembahasan Hasil Penelitian 34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Uji Data Setelah Transformasi Logaritma Natural
Lampiran 2 Kabupaten/Kota Kalimantan Barat Hasil Pengujian Eviews

1. PENDAHULUAN

Banyaknya kabupaten/kota terutama di wilayah pedalaman masih memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik. Hal ini membatasi pergerakan barang dan jasa serta meningkatkan biaya produksi. Infrastruktur yang ada seringkali tidak memadai dalam hal kualitas dan kapasitas, membuat tidak mendukung kegiatan perekonomian. Perekonomian Kalimantan Barat sangat bergantung pada sektor pertanian. Variasi harga produk pertanian dan bencana alam dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kurangnya diversifikasi ekonomi membuat perekonomian rentan terhadap guncangan eksternal. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja harus terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks.

Akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil, masih menjadi tantangan. Proses perizinan yang panjang dan badan regulasi yang rumit serta praktik korupsi dapat menjadi penghalang bagi investor dan meningkatkan biaya produksi. Pembangunan cenderung terpusat di kota-kota besar, sementara daerah perbatasan dan pedalaman masih tertinggal. Masih terdapat kesenjangan pendapatan yang besar antara kota dan desa. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan akan merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan ekonomi jangka panjang. Perubahan iklim akan berdampak negatif terhadap pertanian dan perikanan.

Adapun solusi-solusi dalam mengatiasi permaslahan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat yaitu pembangunan infrastruktur terintegrasi yang berkualitas membuka akses pasar yang lebih luas serta meningkatkan daya saing daerah; pengembangan sektor non-pertanian seperti pariwisata, usaha kecil dan menengah serta energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan pada sektor primer; berinvestasi dalam pelatihan kejuruan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing regional; memperjelas prosedur perizinan dan meningkatkan transparansi dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik; pemerataan

pembangunan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat melindungi lingkungan dan menjamin kemakmuran ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam satu periode waktu tertentu. Hal ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam menghasilkan lebih banyak kekayaan dan kesempatan bagi penduduknya. Menurut Bawinti, *et al* (2018); pertumbuhan ekonomi yang stabil dari berkelanjutan dianggap sebagai faktor penting dalam mencapai kemakmuran jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi suatu daerah karna membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi sangatlah penting bagi masyarakat dan pemerintah setempat yaitu terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, pembangunan infrastruktur, meningkatnya kesejahteraan sosial, dan dapat menarik daya minat investor untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, memperkuat perekonomian lokal, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara maupun daerah tertentu secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dan maju selama periode tertentu.

Merujuk pada Priyono & Ismail, (2016: 41); teori yang dikemukakan oleh Keynes untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Keynes menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam aktivitas perekonomian. Salah satu campur tangan pemerintah terhadap perekonomian adalah dengan melalui kebijakan fiskal. Adanya campur tangan pemerintah terhadap kebijakan fiskal bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keynes menjelaskan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan kebijakan yang dapat meningkatkan permintaan agregat dan penawaran agregat

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berikut ini disajikan Tabel 1.1 yang merupakan data perhitungan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat baik di daerah kabupaten/kota pada tahun 2013 – 2022:

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi
Kalimantan Barat
2013-2022

Kab/kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bengkayang	5,25	5,14	-1,99	4,33	5,45
Landak	4,92	4,88	-0,71	4,89	4,65
Kapuas Hulu	4,66	3,80	-2,43	4,43	4,51
Ketapang	7,83	6,58	-0,49	5,23	5,45
Mempawah	5,76	5,78	0,18	4,10	4,70
Sambas	4,93	4,75	-2,04	4,37	4,64
Sanggau	4,21	3,73	0,71	4,19	4,61
Sintang	5,15	4,99	-2,19	3,80	4,96
Pontianak	4,22	4,02	-3,96	4,60	4,98
Singkawang	4,64	4,41	-2,51	4,82	5,05
Sekadau	5,83	5,44	-0,98	4,31	5,10
Melawi	5,25	4,41	-1,11	4,54	4,90
Kayong Utara	4,94	4,97	-0,76	4,59	5,03
Kubu Raya	5,25	5,68	-2,39	5,18	5,48
Kalimantan Barat	5,07	5,09	-1,82	4,80	5,07

Sumber : *Badan Pusat Statistik (2024)*

Berdasrkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah/kota di Kalimantan Barat menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Tidak ada tren linier yang jelas baik naik maupun turun. Sebagian besar kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebelum tahun 2020. Hal ini menunjukkan kondisi perekonomian yang relatif baik dan kegiatan perekonomian yang relatif dinamis. Tahun 2020 menunjukkan penurunan tajam pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota. Hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai perekonomian. Setelah mengalami konstraksi pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mulai

bangkit kembali pada tahun 2021 dan 2022. Namun, tingkat perbaikannya masih bervariasi antar daerah/kota.

Pertumbuhan ekonomi di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat menunjukkan perbedaan yang signifikan. Beberapa kabupaten/kota seperti Pontianak dan Kubu Raya biasanya memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain. Perbedaan kegiatan perekonomian antar kabuapten/kota dipengaruhi oleh struktur perekonomian masing-masing daerah. Kabupaten/kota yang mengandalkan pada sektor tertentu seperti pertanian, pertambangan atau pariwisata lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan.

Pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat berupa diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan infrastruktur. Pelaku usaha harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha yang dinamis, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan perubahan harga komoditas. Memperkuat kerja sama antar daerah akan meningkatkan persaingan dan membuka peluang usaha yang lebih luas.

Menurut Panigoro, *et al* (2023); pajak daerah merupakan iuran wajib orang pribadi dan badan usaha kepada pemerintah atas penghasilan atau kekayaan yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk keperluan kolektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan menurut Nurfitriana, *et al* (2023); pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya. Meskipun pajak daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun terdapat banyak kendala yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Perpajakan dan proses perpajakan yang rumit dapat mempersulit wajib pajak dan menghambat kepatuhan. Korupsi dalam administrasi perpajakan dapat menurunkan pendapatan daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya membayar pajak dan kewajibannya kepada pemerintah. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak menyebabkan banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Basis pajak daerah masih sempit sehingga potensi penerimaan pajak belum maksimal. Banyak wajib pajak yang menghindari pajak dengan berbagai cara. Kurangnya transparansi dalam distribusi penerimaan pajak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dana pajak yang tidak dialokasikan untuk proyek-proyek yang menguntungkan menghambat pertumbuhan ekonomi. Rendahnya kepatuhan pajak dan kompleksnya industri membuat investor enggan berinvestasi di wilayah ini. Berkurangnya penerimaan pajak dapat menurunkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ketimpangan dalam administrasi perpajakan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut ini disajikan Tabel 1.2 yang merupakan data perhitungan pajak daerah di Kalimantan Barat baik di daerah kabupaten/kota pada tahun 2013 – 2022:

Tabel 1.2
Pajak Daerah
Kalimantan Barat
2013-2022

Kab/Kota	Pajak Daerah (Rupiah)				
	2018	2019	2021	2022	2023
Bengkayang	14.423.290.060	15.826.404.279	16.866.270.060	21.680.313.511	19.399.407.000
Landak	32.101.496.425	39.212.707.026	28.760.736.294	23.527.268.618	26.360.001.000
Kapuas Hulu	16.041.608.749	14.199.084.087	14.638.951.445	16.455.782.267	24.845.309.000
Ketapang	99.703.199.867	102.612.120.725	159.951.510.405	115.321.576.900	199.265.995.000
Mempawah	33.581.814.402	34.746.338.008	36.937.023.725	79.730.682.001	4.822.919.000
Sambas	29.750.525.985	53.863.790.698	40.515.447.841	38.869.906.801	16.604.333.000
Sanggau	51.378.993.542	37.940.170.773	43.427.577.693	54.173.834.812	72.645.986.000
Sintang	136.577.723.607	54.634.160.044	44.901.339.052	41.665.868.567	43.417.933.000
Pontianak	308.900.825.494	332.139.762.217	273.921.641.197	349.602.716.908	471.786.690.000
Singkawang	48.215.803.130	55.880.760.308	54.434.652.301	69.682.698.343	82.427.000.000
Sekadau	26.325.620.767	11.889.875.366	13.580.181.032	14.848.831.964	16.919.386.000
Melawi	19.893.524.920	18.911.713.068	14.600.337.477	15.192.519.241	10.208.434.000
Kayong Utara	5.764.578.661	5.948.453.498	5.692.010.562	6.319.227.471	10.705.418.000
Kubu Raya	133.593.217.033	126.455.410.973	117.410.605.438	150.238.525.521	26.509.142.000
Kalimantan Barat	1.919.257.811.014	1.959.341.747.012	2.121.967.008.054	2.671.657.415.818	1.025.917.953.000

Sumber : *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan (2024)*

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Kalimantan Barat meningkat signifikan pada tahun 2013 hingga tahun 2022 kemudian menurun pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan kepatuhan wajib pajak. Meski trennya meningkat, namun penerimaan pajak daerah juga bervariasi dari tahun ke tahun. Banyak faktor seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan efektivitas penerimaan pajak yang dapat mempengaruhi perbedaan tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak daerah pada masing- masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota seperti Pontianak dan Ketapang umumnya memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini mencerminkan perbedaan kekuatan ekonomi dan basis pajak di masing-masing daerah. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah belum merata di seluruh daerah/kota.

Beberapa kabupaten/kota seperti Pontianak, Ketapang, dan Kubu Raya menyumbang total penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki basis ekonomi yang kuat dan basis pajak yang lebih tinggi. Banyak daerah seperti Pontianak dan Ketapang yang mengalami pertumbuhan penerimaan pajak tercepat selama periode pengamatan. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan investasi atau sistem administrasi perpajakan yang lebih baik. Penerimaan pajak telah menurun di beberapa daerah selama beberapa tahun. Faktor-faktor seperti rendahnya aktivitas ekonomi, rendahnya dukungan kebijakan fiskal, dan bencana alam.

Data ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah dari sektor pajak masih tinggi. Dengan pengelolaan yang baik, pendapatan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah daerah harus terus melaksanakan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan dapat mencakup klarifikasi undang-undang perpajakan, penyederhanaan administrasi perpajakan, dan perluasan basis pajak.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Petugas pajak harus

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Koordinasi pemerintah daerah merupakan hal yang penting dalam administrasi perpajakan. Koordinasi ini dapat mencakup pertukaran informasi, harmonisasi undang-undang perpajakan, dan kerja sama penagihan pajak.

Menurut Tampi, *et al* (2021); belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan untuk membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, dan infrastruktur. Sumber daya ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam jangka panjang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Hakim & Wijayanti, (2016); dengan menambah atau meningkatkan peralatan dan infrastruktur, maka kapasitas produksi suatu negara atau perusahaan dapat ditingkatkan. Berinvestasi pada teknologi dan peralatan baru dapat meningkatkan kualitas produk konstruksi. Infrastruktur yang baik seperti jalan, jembatan dan pelabuhan sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian. Meskipun belanja modal berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pada praktiknya masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Belanja modal seringkali salah alokasinya sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti, proyek infrastruktur yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat atau tidak berkelanjutan. Dana publik untuk belanja modal terbatas sehingga tidak semua prioritas dapat dipenuhi. Korupsi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dapat meningkatkan biaya proyek, menurunkan kualitas proyek, dan mengurangi manfaat sosial. Hal ini dapat mengganggu proses produksi dan meningkatkan biaya proyek.

Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait pelaksanaan proyek infrastruktur dapat menimbulkan permasalahan pemerintah dan tertundanya proses pelaksanaan proyek. Untuk membiayai belanja modal, pemerintah seringkali meminjam. Namun jika utang negara terlalu tinggi maka akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Jika belanja modal tidak efektif dan efisien, maka tidak akan memberikan kontribusi banyak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan distribusi belanja modal menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara wilayah kaya dan miskin. Jika investasi di sektor nonmigas tidak meningkat, perekonomian akan terus bergantung pada fluktuasi harga komoditas. Berikut ini disajikan Tabel 1.3 yang merupakan data perhitungan belanja modal di Kalimantan Barat baik di daerah kabupaten/kota pada tahun 2013 – 2022:

Tabel 1.3
Belanja Modal
Kalimantan Barat
2013-2022

Kab/Kota	Belanja Modal Kab/Kota (Ribu Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Barat	5.341.404.835	5.677.397.310	6.582.879.812	6.303.146.996	5.726.991.913
Sambas	1.701.221.066	1.835.021.132	1.835.021.133	1.854.895.554	1.704.454.437
Bengkayang	1.003.654.006	1.001.490.485	1.001.490.485	1.070.345.023	1.182.320.493
Landak	1.316.910.324	1.377.561.880	1.377.561.880	1.285.616.142	1.310.564.886
Mempawah	1.015.277.056	1.018.061.276	1.018.061.276	857.914.094	1.014.077.736
Sanggau	1.500.872.589	1.590.584.161	1.590.584.161	1.296.485.705	1.602.519.411
Ketapang	2.118.372.563	2.348.730.049	2.348.730.049	1.953.447.854	2.147.760.381
Sintang	1.870.318.612	2.064.531.362	2.064.531.362	1.860.072.209	1.656.179.346
Kapuas Hulu	1.722.177.313	1.805.354.473	1.805.354.473	1.744.613.136	1.520.497.151
Sekadau	873.645.816	885.050.838	885.050.838	700.634.475	847.567.605
Melawi	992.871.227	1.178.488.784	1.178.488.784	1.103.871.885	1.025.041.965
Kayong Utara	734.469.665	750.229.553	750.229.553	822.833.298	730.880.435
Kubu Raya	1.538.247.121	1.580.265.430	1.580.265.429	1.658.062.567	1.568.201.052
Kota Pontianak	1.605.564.262	1.617.630.807	1.617.630.807	1.638.258.591	1.544.226.984
Kota Singkawang	847.350.041	869.159.954	869.159.954	1.053.654.023	808.555.403

Sumber : *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan (2024)*

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa belanja modal daerah/kota Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan infrastruktur dan perekonomian daerah. Meski trennya meningkat, angka investasi bervariasi dari tahun ke tahun. Perbedaan tersebut timbul karena berbagai faktor seperti kondisi perekonomian daerah, program pembangunan, dan kondisi perekonomian nasional. Terdapat perbedaan besar antara biaya modal di setiap daerah/kota. Daerah/kota yang memiliki pusat pertumbuhan ekonomi seperti Pontianak dan

Ketapang cenderung memiliki biaya modal yang lebih tinggi dibandingkan daerah/kota lain. Pertumbuhan belanja modal belum merata di seluruh kabupaten/kota. Beberapa wilayah berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya.

Besarnya dana alokasi umum yang diberikan kepada setiap daerah akan sangat mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin besar kemampuan daerah membiayai belanja modal tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja modal. Kondisi perekonomian nasional dan daerah mempengaruhi belanja modal. Ketika kondisi ekonomi membaik, alokasi belanja modal meningkat.

Peningkatan belanja modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya sehingga dapat meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan, peningkatan belanja modal secara keseluruhan menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan pembangunan di wilayah Kalimantan Barat. Peningkatan belanja modal juga menjadi tantangan pengelolaan anggaran agar pendapatan yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah hendaknya melakukan perencanaan yang matang dalam pengalokasian dana modal agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk merencanakan, melaksanakan dan memantau proyek infrastruktur sangat penting untuk memastikan efisiensi penggunaan dana. Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi, dan menunjukkan masyarakat dalam memantau dan memberikan masukan. Kerja sama dengan sektor swasta dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk pembangunan dan mempercepat laju pembangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Variabel Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Barat."

Peningkatan penerimaan pajak daerah menunjukkan adanya peningkatan kegiatan perekonomian dan pembayaran pajak. Namun masih terdapat permasalahan seperti rumitnya sistem perpajakan, kurangnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya pengawasan. Peningkatan belanja modal mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan perekonomian daerah. Namun distribusi belanja modal seringkali tidak merata dan tidak selalu kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi perekonomian global, kebijakan pemerintah, dan tren pada sektor-sektor utama perekonomian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat?

Adapun tujuan penelitian dari suatu permasalahan yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan teori pertumbuhan ekonomi Keynes dan teori penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Kebijakan Publik). Dalam hal ini, penggunaan teori tersebut untuk memahami bagaimana pajak daerah dan belanja barang dan jasa memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Sehingga dengan digunakannya teori tersebut pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga dan memberikan dasar kepada penelitian selanjutnya yang membahas mengenai peran pemerintah melalui kebijakan fiskal terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi praktis yang diinginkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh pendidikan S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Selain itu sebagai pengamalan ilmu ekonomi yang telah dipelajari selama masa perkuliahan khusus pada mata kuliah ekonomi publik dan ekonomi publik lanjutan.
2. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan informasi kepada pemerintah sehingga menjadi referensi dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan terkhusus pada kebijakan fiskal kedepannya.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi, rujukan/ataupun bahan yang bermanfaat dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan untuk menguji lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan.